

Pemberdayaan UMKM sebagai Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2020–2023

Azrene Dwi Ariani^{1*}, Diniardy Zouly Indra Cahyono², Rhobatin Nur Azizah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email : azrineda71@gmail.com, diniardizoulyindracahyono@gmail.com,
rhobatinazizah3011@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received September 23, 2024 Revised November 28, 2024 Accepted December 17, 2024 Available online December 31, 2024 *Corresponding author email : azrineda71@gmail.com Keywords: Poverty, MSMEs, Government Strategy	Introduction/Main Objectives: Poverty remains a significant challenge for Indonesia's economic development, further exacerbated by the COVID-19 pandemic, making the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) a key strategy for sustainable solutions. This study aims to analyze government strategies for poverty alleviation in Indonesia through MSME empowerment during the period 2020–2023. Research Methods: The research employs a qualitative approach with a literature review, encompassing articles, scientific journals, books, and official government reports, to identify policies, programs, and challenges encountered. Finding/Results: The findings reveal that (1) financial assistance and subsidies for MSMEs helped sustain businesses during the pandemic; (2) MSME digitalization programs, including e-commerce training and digital platform provision, enhanced the competitiveness of local products; and (3) entrepreneurial training and market access expansion improved MSME capacities, although implementation remains uneven across Indonesia. Key challenges include limited digital literacy, inadequate infrastructure in remote areas, and weak oversight of aid distribution. Conclusion: This study concludes that MSME empowerment holds significant potential for poverty reduction if supported by sustainable policies, infrastructure strengthening, cross-sector collaboration, and continuous literacy and mentoring initiatives.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan isu kompleks dan multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi, khususnya selama masa pandemi COVID-19 ([Sani dkk., 2022](#)), karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Selain itu, dampak sosial pandemi memperburuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga memperdalam kondisi kemiskinan di masyarakat.

Pandemi COVID-19 juga membawa dampak besar pada perekonomian nasional, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan yang tajam, berujung pada penutupan usaha dan pengurangan tenaga kerja. Mengingat UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sektor ini menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan pasca-pandemi.

Dalam kerangka teori kemiskinan, konsep multidimensi mencakup aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan yang saling terkait. Teori pemberdayaan ekonomi menyoroti pentingnya akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan pasar bagi masyarakat rentan. Selain itu, teori pembangunan ekonomi lokal menekankan peran strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan dampak positif pemberdayaan UMKM terhadap pengurangan kemiskinan. Sebagai contoh, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Namun, UMKM menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses keuangan dan kesulitan beradaptasi dengan digitalisasi ([Anggarini, 2022](#)). Pandemi juga mengungkap ketidaksiapan banyak UMKM dalam beralih ke pemasaran digital, yang menjadi esensial dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi UMKM dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta mengevaluasi strategi pemerintah dalam mendukung UMKM pada periode 2020–2023. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi UMKM dalam perannya sebagai solusi kemiskinan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika tersebut, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi efektif untuk mendukung penguatan UMKM dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM di Indonesia pada periode 2020–2023. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti mengakses dan mensintesis berbagai data sekunder dari dokumen resmi, artikel ilmiah, laporan kementerian, serta publikasi dari organisasi internasional (Sugiono, 2010). Data yang digunakan mencakup kebijakan pemberdayaan UMKM, indikator kemiskinan, dan laporan statistik terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur daring dan analisis dokumen resmi, sementara analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *content analysis* dengan mengidentifikasi tema utama, mengkategorisasi kebijakan, dan mensintesis dampaknya terhadap kemiskinan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, relevansi literatur, dan audit trail. Dengan menggunakan data yang relevan dan terkini, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Indonesia tahun 2020-2023

Kemiskinan di Indonesia adalah isu kompleks yang mencakup berbagai dimensi dan menjadi fokus perhatian setiap kepemimpinan sebuah pemerintah. kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Definisi kemiskinan berbeda tergantung perspektifnya. Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik (BPS) mendeskripsikan kemiskinan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Indikator kemiskinan meliputi akses layanan publik, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan, yang memberikan gambaran holistik tentang masalah ini yang berada di daerah perdesaan maupun yang berada di daerah perkotaan (Mualif dkk., 2024) .

Tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan perubahan yang fluktuatif dari waktu ke waktu. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mencapai 10,19%, tetapi meningkat menjadi 10,64% pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Penelitian menyatakan bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi masih menghadapi tantangan besar, dan angka kemiskinan diperkirakan tetap tinggi tanpa intervensi yang efektif. Kemiskinan ekstrem, di mana seseorang hidup dengan penghasilan kurang dari USD 1,9 per hari, menjadi perhatian khusus pemerintah.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada kemiskinan di Indonesia. Banyak rumah tangga kehilangan sumber penghasilan akibat pembatasan sosial dan penutupan usaha. Kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan, menjadi yang paling terdampak. Selain itu, dampak jangka panjang pandemi pada kesehatan dan pendidikan anak-anak dapat memperburuk siklus kemiskinan di masa depan.

Penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam dan saling berkaitan. Faktor ekonomi, seperti pertumbuhan yang tidak merata, ketidakstabilan pasar kerja, dan akses modal yang terbatas, menjadi penyebab utama. Di sisi lain, faktor sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan, buruknya kondisi kesehatan, dan ketidakadilan gender turut memperburuk keadaan ([Adawiyah, 2020](#)).

UMKM Di Indonesia Pada Tahun 2020-2023

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi komponen penting dalam perekonomian negara berkembang. UMKM berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, meningkatkan kewirausahaan, dan berkontribusi pada ekspor, impor, serta pendapatan pajak ([Zaelani, 2019](#)). Selain itu, UMKM mampu mengatasi permasalahan ekonomi, seperti pengangguran, dengan menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Di Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha terbesar dan terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, usaha kecil memiliki 5-19 tenaga kerja, sedangkan usaha menengah memiliki 20-99 tenaga kerja. UMKM juga membantu memperkuat struktur ekonomi nasional dengan mengurangi pengangguran dan kesenjangan, serta mempromosikan produk dalam negeri ke pasar internasional. Ketahanan UMKM terhadap krisis didukung oleh ketergantungan yang rendah pada modal besar atau pinjaman dalam mata uang asing, sehingga mereka lebih stabil dibandingkan perusahaan besar yang terpapar fluktuasi nilai tukar ([Alansori & Listyaningsih, 2020](#)).

UMKM di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM mencakup usaha mikro dengan aset di bawah Rp 50 juta, usaha kecil dengan aset Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dan usaha menengah dengan aset Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar. Jenis-jenis UMKM meliputi sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi ([Marginingsih, 2021](#)).

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM juga mendukung ketahanan ekonomi lokal, terutama di daerah terpencil, dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Statistik menunjukkan pertumbuhan positif UMKM dari 2020 hingga 2023 meskipun menghadapi tantangan pandemi. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat peningkatan jumlah UMKM dari 64 juta pada 2020 menjadi lebih dari 70 juta pada 2024 ([Hapsari dkk., 2024](#)). Pertumbuhan ini didukung oleh digitalisasi, yang memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas ([Bahasoan dkk., 2025](#)). Namun, kendala seperti akses pembiayaan dan kurangnya pelatihan keterampilan masih menjadi hambatan utama.

Pandemi memberikan dampak besar pada UMKM, dengan banyak usaha yang terpaksa tutup atau mengurangi operasional. Sekitar 30% UMKM mengalami penurunan pendapatan drastis selama pandemi. Meski demikian, beberapa UMKM berhasil beradaptasi

dengan menggunakan platform digital untuk menjual produk secara online, menunjukkan peluang pertumbuhan di masa pasca-pandemi. Dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting untuk membantu UMKM pulih dan berkembang (Akmal & Arifa, 2023).

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Umkm Di Indoenesia 2020-2023

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sebagai sektor yang mendominasi perekonomian Indonesia, UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Farisi dkk., 2022). Sektor ini telah terbukti menjadi penyangga sosial dan ekonomi, terutama di tengah tantangan yang dihadapi negara, baik itu krisis ekonomi global, bencana alam, hingga pandemi COVID-19.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, berusaha mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM. Program seperti Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM dan pelatihan digitalisasi bagi pelaku UMKM menjadi upaya strategis dalam mendorong sektor ini untuk berkembang dan kembali menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan dalam hal akses pembiayaan dengan menurunkan suku bunga pinjaman dan memberikan insentif pajak untuk UMKM yang berkembang. Ini bertujuan agar UMKM tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor yang kini berkembang seperti *e-commerce*, manufaktur lokal, dan layanan digital (Sifwah, 2024). Selain itu, digitalisasi UMKM juga diharapkan dapat memperluas pasar dan menciptakan peluang kerjav UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. baru. Di tahun 2021, lebih banyak UMKM yang mulai beradaptasi dengan teknologi digital, memanfaatkan platform *e-commerce*, dan melakukan pemasaran melalui media sosial. Inisiatif ini membuka peluang baru untuk tenaga kerja di bidang teknologi, pemasaran digital, dan logistik.

Data Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor UMKM Di Indonesia Tahun 2020-2023			
Tahun	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap oleh UMKM	Kontribusi terhadap Total Tenaga Kerja	Catatan penting
2020	115 juta	96%	Pandemi COVID-19 memengaruhi sebagian besar UMKM, tetapi tetap menjadi penyangga utama lapangan kerja.
2021	117 juta	97%	UMKM mulai pulih dengan dukungan pemerintah, terutama melalui program KUR. (Janah, 2024)

2022	120 juta	97%	Peningkatan signifikan berkat percepatan digitalisasi dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
2023	117 juta	97%	Ekonomi stabil pasca pandemi, UMKM makin kuat di sektor digital dan ekonomi kreatif.

Sumber: Statistik Indonesia, BPS, 2023 (Statistik, t.t.)

Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM menunjukkan tren yang stabil, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, UMKM kembali mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap, didukung oleh pemulihan ekonomi nasional. serta tahun 2023 UMKM terus tumbuh dengan kontribusi signifikan dari sektor digital dan layanan, yang kini menjadi pendorong utama penciptaan lapangan kerja. Stabilitas ekonomi pascapandemi juga membantu UMKM mempekerjakan kembali tenaga kerja yang sempat kehilangan pekerjaan (Widyaningrum dkk., 2024).

Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM di Indonesia merupakan aspek penting dalam mendukung perekonomian nasional. Hal ini yang menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ketenagakerjaan, khususnya di daerah-daerah terpencil di mana akses terhadap pekerjaan formal terbatas. Salah satu keunggulan UMKM adalah fleksibilitasnya dalam memberdayakan tenaga kerja dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang memiliki keterampilan rendah atau kurang berpendidikan. Sektor ini juga memberikan peluang bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan pemuda, untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, UMKM di bidang kuliner, kerajinan, atau jasa sering kali mengandalkan tenaga kerja lokal, yang sekaligus mendorong pemberdayaan komunitas setempat.

Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi UMKM dalam meningkatkan kualitas pekerjaan yang mereka tawarkan. Sebagian besar UMKM berada di sektor informal, sehingga pekerja mereka sering kali tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan seperti jaminan sosial atau upah layak. Selain itu, rendahnya adopsi teknologi dan kurangnya pelatihan menjadi hambatan bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja mereka. Kemajuan teknologi menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan, khususnya di sektor ekonomi digital. UMKM yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru dapat menciptakan jenis pekerjaan baru, seperti pemasaran digital atau pengelolaan platform e-commerce. Namun, tidak semua UMKM memiliki akses yang setara terhadap teknologi ini, terutama yang berada di daerah dengan infrastruktur digital yang belum memadai.

Hubungan Umkm Sebagai Solusi Pengetasan Kemiskinan Di Indonesia 2020 -2023

Hubungan antara UMKM dan pengentasan kemiskinan sangat erat karena UMKM menyediakan akses ekonomi kepada kelompok masyarakat yang sering kali terpinggirkan. Dengan menciptakan lapangan kerja di sektor formal maupun informal, UMKM

memungkinkan masyarakat yang kurang berpendidikan atau tidak memiliki keterampilan tinggi tetap mendapatkan penghasilan. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran, yang merupakan salah satu faktor utama kemiskinan. Di daerah terpencil, di mana peluang kerja formal terbatas, UMKM menjadi solusi utama dalam menyediakan pekerjaan. Dengan mendukung ekonomi lokal, UMKM membantu menjaga stabilitas ekonomi di daerah pedesaan sekaligus mengurangi arus urbanisasi yang disebabkan oleh pencarian pekerjaan.

Selain itu, UMKM sering kali menjadi pelopor pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi, UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi juga mendorong inklusi sosial dan ekonomi (Pellu, 2024). Digitalisasi UMKM juga membuka peluang baru untuk meningkatkan pendapatan. Pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi memiliki akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor digital.

Data yang menunjukkan hubungan antara UMKM dan kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia

Aspek	Peran UMKM	Dampak pada Pengentasan Kemiskinan
Penciptaan Lapangan Kerja	UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja dari total angkatan kerja Indonesia (Kemenkop UKM, 2023).	Memberikan penghasilan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi pengangguran, terutama di pedesaan.
Akses Pada Ekonomi Lokal	UMKM beroperasi di daerah pedesaan dan kota kecil, mendukung ekonomi lokal.	Memberikan peluang ekonomi di daerah terpencil, membantu masyarakat yang sulit mengakses pekerjaan formal.
Pemberdayaan Kelompok Rentan	Banyak UMKM mempekerjakan perempuan, pemuda, dan masyarakat tanpa pendidikan tinggi.	Meningkatkan pendapatan rumah tangga kelompok rentan, mengurangi ketimpangan gender dan sosial.
Produksi Barang Murah	UMKM menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau.	Membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok dengan biaya rendah, meningkatkan daya beli masyarakat bawah.
Digitalisasi dan Inovasi	Digitalisasi UMKM menciptakan peluang kerja baru di sektor teknologi dan pemasaran digital.	Membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan pelaku usaha kecil meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023

Dengan berbagai peran tersebut, UMKM terbukti menjadi solusi efektif dalam pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan ini memerlukan dukungan pemerintah dan swasta melalui kebijakan pro-UMKM, akses ke pasar, teknologi, dan modal, serta pelatihan yang berkelanjutan. Kombinasi usaha dari berbagai pihak akan memperkuat UMKM sebagai penggerak pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, agar kontribusi UMKM terhadap pengentasan kemiskinan dapat lebih maksimal, diperlukan dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, dan pengembangan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Hal ini akan membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan yang mereka tawarkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Peluang dan Tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia 2020-2023

Salah satu sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat (Nainggolan, 2022).

Perkembangan teknologi digital memungkinkan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara online dan melakukan transaksi melalui system perbankan online (Zhahirah dkk., 2023) Peluang besar terbuka bagi UMKM di tengah populasi Indonesia yang sangat besar dan beragam. Pasar domestik yang luas memberikan potensi tinggi untuk pertumbuhan. Selain itu, dukungan pemerintah melalui berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, dan bantuan digitalisasi, menjadi stimulus penting bagi UMKM untuk berkembang. Era transformasi digital juga membuka pintu lebar bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka melalui platform e-commerce, sehingga

menjangkau pasar lokal maupun internasional ([Tayibnapis, 2021](#)). Keunikan produk lokal berbasis budaya, seperti batik, kerajinan tangan, dan kuliner khas, menjadi nilai tambah yang tidak hanya diminati di dalam negeri tetapi juga oleh konsumen global.

Namun, di balik peluang tersebut, UMKM juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Akses terhadap modal masih menjadi kendala utama bagi banyak pelaku usaha kecil. Proses pengajuan kredit sering kali terhambat oleh persyaratan yang ketat, seperti agunan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, terutama dalam hal manajemen, pemasaran, dan penggunaan teknologi, turut menghambat daya saing UMKM. Kompetisi dengan produk impor yang lebih murah juga menjadi tantangan berat, terutama bagi UMKM yang belum mampu meningkatkan kualitas produknya.

Digitalisasi yang semakin penting juga menghadirkan masalah tersendiri. Tidak semua UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, memiliki kemampuan atau akses untuk memanfaatkan teknologi digital. Regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang sering kali menjadi hambatan tambahan, membuat pelaku UMKM kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka. Tantangan ini diperparah oleh masalah infrastruktur, yang menghambat distribusi produk, serta dampak pandemi COVID-19, yang memperlihatkan kerentanan sektor UMKM terhadap perubahan ekonomi global.

Pemerintah bersama Kadin Indonesia terus mendorong pelaku UMKM untuk memasuki ekosistem digital. Pada tahun 2023, target pemerintah adalah 24 juta unit UMKM dapat beroperasi secara digital, dan angka ini diharapkan meningkat menjadi 30 juta unit pada tahun 2024. Transformasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM. Termasuk di pasar global dan berorientasi ekspor. Namun, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Terutama terkait inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perijinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, serta sumber daya manusia ([Hamurwati, 2022](#)).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terus berupaya secara maksimal. Utamanya dengan dukungan melalui berbagai program pelatihan, pelatihan, dan fasilitasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis. Edukasi dan pelatihan tentang digitalisasi harus terus ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat bersaing di era modern. Kemudahan akses pembiayaan juga harus menjadi prioritas, dengan penyederhanaan proses dan pengurangan suku bunga. Selain itu, inovasi produk perlu terus didorong, sehingga UMKM mampu menawarkan barang dan jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan secara adaptif, UMKM memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Sektor ini adalah tulang punggung yang, jika dikelola dengan baik, dapat membawa bangsa ini menuju kemakmuran yang lebih merata.

Strategi Pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan pemberdayaan UMKM di Indonesia

Menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu Pondasi Perekonomian Nasional, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kontribusi UMKM mencapai 99% seluruh unit usaha, kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan mampu menyerap tenaga kerja 96,9%. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis, bahkan menjadi booster pemulihan ekonomi pada saat krisis, termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Namun demikian, umumnya UMKM di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan, beberapa tantangan tersebut antara lain akses keuangan, pemasaran/promosi, infrastruktur dan teknologi, regulasi dan birokrasi serta keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan (Ariyanti, 2022).

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Pemberdayaan UMKM Biasa dilakukan oleh *stakeholder*, keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan *stakeholder* UMKM antara lain terdiri dari instansi pemerintah, Lembaga pendidikan (perguruan Tinggi), keterlibatan yang ada masih bersikap sendiri-sendiri dan kurang intergratif antara *stakeholder* satu dengan yang lain Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana, data UMKM (Hardi & Zaharman, 2018).

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain (Hardi & Zaharman, 2018).

Pada tahun 2022, Kemenkop UKM telah menyiapkan penyusunan *roadmap* untuk percepatan transformasi digital UMKM. *Roadmap* ini dikembangkan untuk periode waktu 2021 sampai dengan 2023. Dalam memperbarui *roadmap* ini ke depan, kementerian dan

lembaga terkait di atas dapat dilibatkan secara intensif dalam pengembangan *roadmap* tersebut. *Roadmap* tersebut harus merepresentasikan 'kepentingan bersama' dalam rangka penguatan UMKM. Artinya, segala program dan kegiatan dari kementerian dan lembaga terkait UMKM harus mengacu pada *roadmap* tersebut sehingga akan menjadi sinkron satu sama lain (Nurprabowo & Meilani, 2022).

Pemerintah perlu membuat kebijakan kelembagaan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi beroperasinya UKM. Untuk itu maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Mengemukakan beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pemberdayaan UKM :

1. kebijakan persaingan sehat dengan pengurangan distorsi pasar
2. kebijakan ekonomi yang memberi peluang UKM dapat mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, dan
3. kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

Selanjutnya dukungan penguatan yang meliputi: peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan penguasaan informasi, peningkatan penguasaan permodalan, peningkatan penguasaan pasar, pengoptimalan organisasi dan manajemen, pencadangan tempat usaha, dan pencadangan bidang usaha. Pemerintah daerah dapat memberdayakan UKM melalui pembuatan Peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Memang banyak UKM yang masih menghadapi kendala yaitu lingkungan yang tidak kondusif untuk berusaha. Misalnya, ijin yang sulit atau penyogokan yang memberatkan usaha UKM. Jika ini dilakukan berarti pemerintah membantu UKM keluar dari kendala internal dan eksternal. Dalam upaya pemberdayaan usaha kecil pemerintah membuat aturan kebijakan pendanaan. Aturan tersebut ditetapkan dalam rangka membantu UKM untuk bisa tumbuh lebih sehat (Hardi & Zaharman, 2018).

KESIMPULAN

Peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia selama periode 2020-2023. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Strategi pemerintah, seperti peningkatan akses permodalan, pelatihan keterampilan, fasilitasi pemasaran, dan adopsi teknologi digital, telah memainkan peran vital dalam memberdayakan UMKM. Namun, masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan pembiayaan dan rendahnya kesiapan digital sebagian besar pelaku UMKM.

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar pada UMKM, dengan banyak usaha yang terpaksa menutup operasionalnya. Meski demikian, sebagian UMKM berhasil beradaptasi dengan transformasi digital, yang membuka peluang untuk pertumbuhan pasca-pandemi. Pemberdayaan UMKM melalui kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi salah satu solusi struktural yang efektif untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, penguatan sektor UMKM diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adawiyah, S. (2020). *Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya*.
- Akmal, N. H., & Arifa, C. (2023). Resiliensi Bisnis Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Pengusaha Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i1.82078>
- Alansori, A., & Listyaningsih, E. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit Andi.
- Ariyanti, L. (t.t.). *Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>
- Bahasoan, A. N., S. N. Q., Wahdaniah, B. I., & Azis, M. S. (2025). Transformasi Digital pada UMKM: Penggerak Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi di Negara Berkembang. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), Article 1.
- Farisi, S. A., Fasa, M. iqbal, & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 9(No 1), 73.
- Hamurwati, S. A. (t.t.). *Perkembangan UMKM di Indonesia*. <https://www.rri.co.id/lain-lain/1066937/perkembangan-umkm-di-indonesia>
- Hapsari, Y. A., Apriyanti, P., Hermiyanto, A., & Rozi, F. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53–62. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>
- Hardi, & Zaharman. (2018). Strategi pemerintah kota pekanbaru dalam pemberdayaan dan pembinaan UMKM menghadapi MEA. *Jurnal Daya Saing*, Vol 4(no 1).
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 110–116. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>
- Mualif, A., Jabbar, A., & Syarifuddin, H. (2024). Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(1), Article 1. <https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/259>

- Nainggolan, I. U. (t.t.). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/umkm-bangkit-ekonomi-indonesia-terungkit.html>
- Nurprabowo, A., & Meilani, M. M. (t.t.). *Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional*. Kajian Strategis Seri Energi Hijau.
- Pellu, A. (2024). Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 2(No 2).
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499>
- Statistik, B. P. (t.t.). *Jumlah dan persentase penduduk bekerja dan pengangguran, 2024*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>
- Tayibnapis, A. Z. (2021). *Kebangkitan UMKM di Indonesia*. CV Jakad Media Publishing.
- Widyaningrum, U., Mulyadi, D., & Sandi, S. (2024). Pengaruh Modal Usaha, Upah Tenaga Kerja, Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Umkm Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Journal of Economic Business and Accounting*, Vol 7(No 2).
- Zaelani, I. R. (2019). Peningkatan Daya Saing Umkm Indonesia: Tantangan Dan Peluang Pengembangan Iptek. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.23969/transborders.v3i1.1746>
- Zhahirah, A., Wibowo, S. P., Ramadhani, A., Pratama, M. R. N., & Panorama, M. (2023). Peluang dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Era Digital. *Jurnal pendidikan Tambusai*, Vol 7(no 3).